

Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan dan Relasinya dan Pendidikan Islam (Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya Bagi Pendidikan)

Anggun Feronika¹, Si'in²

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Article Info

*Corresponding

Author:

Name: Anggun Feronika

Email:

anggunferonika863@gmail.com

Abstract

Kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Konsep "Merdeka Belajar" merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah maupun informal dan formal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan "Merdeka Belajar". Dampak Merdeka Belajar di Sekolah kurikulum merdeka pada program Merdeka Belajar menggunakan pendekatan progresif yang menekankan proses belajar secara langsung melalui penerapan. Karena itu dikembangkan metode belajar project based learning. Dalam Pembelajaran dengan sistem ini, anak-anak didorong untuk mengerjakan sebuah project sebagai sarana mereka untuk belajar.

Keywords:

Kebijakan Pendidikan, Kritis, Pendidikan Islam, Merdeka Belajar

Introduction

Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Salah satu faktor utama rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Program pendidikan nasional yang dirancang diyakini belum mampu menjawab harapan dan tantangan di masa depan. Dalam menghadapi hal ini, pendidikan yang bermutu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi sebuah keharusan, karena

pendidikan memainkan peranan yang sangat fundamental dimana cita-cita suatu bangsa dan negara dapat tercapai.¹

Perkembangan dunia saat ini telah mencapai pada era yang dikenal dengan era industri 4.0 dan bergerak menuju era Society 5.0. Era global saat ini umat Islam dihadapkan pada keterombang-ambing antara budaya/tradisi Islam dan kekuatan modern (sekularisasi dan modernisasi). Sebagian besar umat Islam sedikit banyak telah terpengaruh oleh kehidupan modern. Muncul kegalauan dalam memposisikan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi manusia dalam posisinya sebagai khalifah dan hamba Allah dan pada sisi lainnya tuntutan kehidupan modern (kehidupan barat) memunculkan nilai-nilai yang cenderung merupakan antitesa nilai-nilai Islam.

Berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan krisis eksistensial merupakan dampak dari penolakan manusia modern terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern dengan pendekatan positivistik-antroposentris berimplikasi pada munculnya peradaban yang hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya tuhan.

Perubahan dunia tersebut kemudian memunculkan dampak yang positif dan negatif yang kemudian memunculkan tantangan besar bagi lembaga pendidikan. Dampak dari era ini dirasakan oleh setiap kalangan, diantaranya oleh dunia pendidikan.³ Era ini ditandai dengan vitalnya peran teknologi dan informasi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Era industri 4.0 melahirkan konsep pendidikan 4.0. Konsep pendidikan ini muncul guna mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan peserta didik untuk bersaing di era modern. Salah satu karakteristik dari konsep pendidikan 4.0 adalah posisi peserta didik sebagai subjek pendidikan (*student centered*), integrasi materi serta proses belajar mengajar (PBM) dengan tuntutan pengetahuan modern, masyarakat, dan dunia kerja.

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat universal dunia, perlu menemukan solusi permasalahan manusia modern. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, rekonstruksi sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan. Realitas pendidikan di Indonesia cenderung berkiblat kepada teori-teori barat.

Hal ini merupakan ironi jika melihat mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Salah satu contoh dari hal ini adalah rumusan kurikulum

¹ Siti Baro'ah, KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, *Jurnal Tawadhu*, 4 no 1, (2020): 1063.

dan pendidikan karakter di Indonesia banyak digunakan teori-teori pemikir tokoh barat, padahal pemikir Islam-pun tidak sedikit yang membahas konsep sistem pendidikan dan pendidikan karakter. Beberapa persoalan tersebut menuntut adanya reorientasi pendidikan, sebagai berikut: (1) orientasi pembelajaran terfokus pada ketercapaian standar minimal yang mengesampingkan proses pembelajaran secara keseluruhan; (2) peran peserta didik sebagai objek pendidikan; (3) relevansi materi dan PBM dengan tuntutan akademik, masyarakat, dan dunia kerja.²

Result and Discussion

Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satunya adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Menurut Ihwanuddin Pulungan & Asfiati dalam Darise selanjutnya, alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan.

Menurut Mustaghfiroh, dalam Darise pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas, andal dan relevan bagi generasi yang mengecamnya serta bagi dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang berkualitas mencerminkan masyarakat maju dan modern.

Menurut Yamin Muhammad dalam Darise Pendidikan menjadi suluh bagi menapaki langkah awal suatu kemajuan. Pendidikan merupakan mesin

² Syamsul Arifin, Nurul Abidin, Fauzan Al Anshori, Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7 no 1 (Juni 2021): 66-67.

penggerak semua aktivitas peradaban. Peserta didik dan pendidik mesti melakukan suatu kewajiban untuk memajukan pendidikan. Berdasarkan kebijakan kemajuan pendidikan, maka peserta didik dan pendidik memperoleh keberhasilan pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan “Merdeka Belajar” lahir adanya suatu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini pendidikan mesti dikedepankan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita rakyat Indonesia yang cerdas, adil, arif, dan bijaksana. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman.³

Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” mesti memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas
3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi
5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang *confidence* atau kepercayaan diri.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan tercapai dan berhasil yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih memfokuskan kepada materi ajar Pendidikan

³ Gina Nurvina Darise, Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”, *Journal of Islamic Education*, 2 no 2, (Februari 2021): 8.

Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori. Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang memiliki komunikasi adalah yang terbiasa dengan aktivitas kemajuan dengan menyikapi keseluruhan teori-teori keberagamaan. Peserta didik yang kolaboratif, di mana mampu menyesuaikan diri dari semua aspek dan harapan pembelajaran yang indah dan menyenangkan. Tujuan terakhir adalah peserta didik yang konfiden memiliki kepercayaan diri penuh dan bertanggung jawab secara akuntabilitas dan responsibilitas. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam membawa perubahan baru. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mencapai integritas yang mendorong peserta didik mampu maju dan bergerak sesuai dengan zamannya.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan agar peserta didik berpengaruh bagi setiap insan di mana pun berada. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik dengan cara mengetahui, memahami, bersikap positif. Tercapainya tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh peran serta pendidik, materi ajar yang representatif, peserta didik yang memiliki kemauan dan skill. Peserta didik mengaplikasikan setiap materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik mampu memadukan antara ekspektasi dan realita.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dijadikan panduan, arah dan sasaran terhadap tindakan yang dilakukan secara tepat dan jelas. Pendidikan Agama Islam diberikan bukanlah sebatas memberikan pengetahuan, tetapi lebih jauh guna pembentukan sikap dan kepribadian serta kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing peserta didik. Untuk itu kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mestilah diupayakan menciptakan peserta didik yang bebas merdeka. Merdeka dalam memperoleh materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan merdeka dalam mengedepannya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, menyahuti betapa prioritasnya mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di program “Merdeka Belajar”, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Kewajiban tiap satuan pendidikan untuk menyediakan guru agama yang sama dengan keyakinan peserta didiknya meski dia minoritas. Guru agama ini nantinya yang memiliki otoritas untuk memperkuat keberagamaan peserta didiknya.

2. Lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengajarkan agamanya.
3. Lembaga keagamaan mempersiapkan guru-guru yang memiliki keahlian tentang agama dan sekaligus bisa menerjemahkan ke dalam kurikulum yang ada.
4. Pemerintah dalam hal ini kerja sama dengan sekolah/satuan pendidikan merancang kurikulum untuk tercapainya proses belajar yang dapat menumbuhkan kemerdekaan belajar.

Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah maupun informal dan formal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini dengan melatih peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa berpikir kritis (*critical thinking*) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri.⁴

Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya Bagi Pendidikan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Kata kebijakan Hasbullah, adalah terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, disandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata *educational policy* yang berasal dari 2 kata, sehingga Hasbullah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Duncan MacRae analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan

⁴ Gina Nurvina Darise, Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”. 13

untuk pemecahan, jadi penulis merumuskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses evaluasi kebijakan untuk tujuan tertentu.

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya.

Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni Survei Karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik. Siti Mustaghfiroh. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud, 2019: 1-5), yaitu: 1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Kemendikbud, 2019: 1); 2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya (Kemendikbud, 2019); 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan

peningkatan kompetensi (Kemendikbud, 2019); 4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Kemendikbud, 2019).⁵

Dampak Merdeka Belajar di Sekolah kurikulum merdeka pada program Merdeka Belajar menggunakan pendekatan progresif yang menekankan proses belajar secara langsung melalui penerapan. Karena itu dikembangkan metode belajar project based learning. Dalam Pembelajaran dengan sistem ini, anak-anak didorong untuk mengerjakan sebuah project sebagai sarana mereka untuk belajar. Misalnya kewirausahaan dengan membuat dan memasarkan suatu produk. Bentuk project tentu menyesuaikan dengan masing-masing mata pelajaran yang diambil oleh murid.

Sekitar 30% adalah proses belajar melalui praktik. Sisanya dengan teori. Artinya anak-anak tidak dihadapkan dengan teks secara terus-menerus. Mereka akan banyak belajar melalui konteks dan pengalaman langsung. Mungkin dengan kurikulum sebelumnya, telah banyak juga guru yang telah menerapkan metode belajar tersebut. Tetapi dengan disistamkan, efek yang dihasilkan dapat lebih optimal karena terjadi secara lebih luas dan masif. Para guru akhirnya harus belajar untuk mengembangkan metode atau cara belajar yang mampu menarik minat dan antusiasme para murid, sekaligus mengembangkan cara kreatif untuk belajar melalui praktik atau pengalaman langsung. Dengan begitu, para murid akan memiliki pengalaman belajar yang lebih utuh. Mereka akan lebih mudah dalam menyerap dan memahami materi-materi pelajaran yang ada di Sekolah. Proses belajar yang diterima juga akan lebih variatif.

Keadaan yang menggembirakan ini tentu membutuhkan proses adaptasi dan upgrade yang pesat dari institusi pendidikan termasuk para guru dengan dukungan seluruh orang tua. Maka guru-guru di Sekolah diharapkan dapat cepat tanggap untuk menyesuaikan diri.⁶

Conclusion

Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam

⁵ Rati Melda Sari, ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 no 1, (Desember 2019): 39-40 .

⁶ <https://id.linkedin.com/pulse/dampak-merdeka-belajar-bagi-guru-dan-murid>

menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam disampaikan baik secara formal di sekolah maupun informal dan formal di rumah dan masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini dengan melatih peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa berpikir kritis (critical thinking) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri. Dampak Merdeka Belajar di Sekolah kurikulum merdeka pada program Merdeka Belajar menggunakan pendekatan progresif yang menekankan proses belajar secara langsung melalui penerapan. Karena itu dikembangkan metode belajar project based learning. Dalam Pembelajaran dengan sistem ini, anak-anak didorong untuk mengerjakan sebuah project sebagai sarana mereka untuk belajar. Misalnya kewirausahaan dengan membuat dan memasarkan suatu produk. Bentuk project tentu menyesuaikan dengan masing-masing mata pelajaran yang diambil oleh murid.

References

- Gina Nurvina Darise, Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks “Merdeka Belajar”, *Journal of Islamic Education*, 2 no 2, (Februari 2021): 8.
- Rati Melda Sari, Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 no 1, (Desember 2019): 39-40 .
- Siti Baro’ah, Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Tawadhu*, 4 no 1, (2020): 1063.
- Syamsul Arifin, Nurul Abidin, Fauzan Al Anshori, Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7 no 1 (Juni 2021): 66-67.
- <https://id.linkedin.com/pulse/dampak-merdeka-belajar-bagi-guru-dan-murid>